

Rapat Paripurna Ke-8 Tahun 2018 Legislatif Terima Empat Ranperda untuk Segera Dibahas



Bali Post/ist

RANPERDA - Bupati Tabanan saat menyampaikan empat Ranperda ke jajaran legislatif, Senin kemarin.

Tabanan (Bali Post) -

Empat buah ranperda diserahkan eksekutif ke jajaran legislatif untuk segera dibahas di gedung dewan pada rapat paripurna ke-8 tahun 2018, Senin (25/6) kemarin. Ranperda yang disampaikan kali ini terkait menanggapi Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang merupakan opini tertinggi atas audit laporan keuangan dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Bali, 28 Mei 2018.

Empat ranperda tersebut yaitu Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017, Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, dan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pena-

taan Toko Swalayan.

Sidang dibuka Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Ketut Suryadi didampingi para Wakil DPRD Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya dan Forkopinda Tabanan serta seluruh OPD di lingkungan Pemkab Tabanan.

Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti mengajak jajarannya agar mempertahankan raihan Opini WTP empat kali berturut-turut. Berharap selalu melakukan pembenahan karena masih banyak kelemahan meskipun mendapatkan WTP. "Mohon dipertahankan, karena membuat lebih mudah daripada merawat. Jangan sampai Opini WTP ini membuat lupa diri, melainkan bahan evaluasi menjadi lebih baik," tegasnya.

Bupati Eka juga menyampaikan

gambaran umum realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2017. Pendapatan daerah dianggarkan Rp 1,91 triliun lebih, sampai akhir tahun realisasinya sebesar Rp 1,87 triliun.

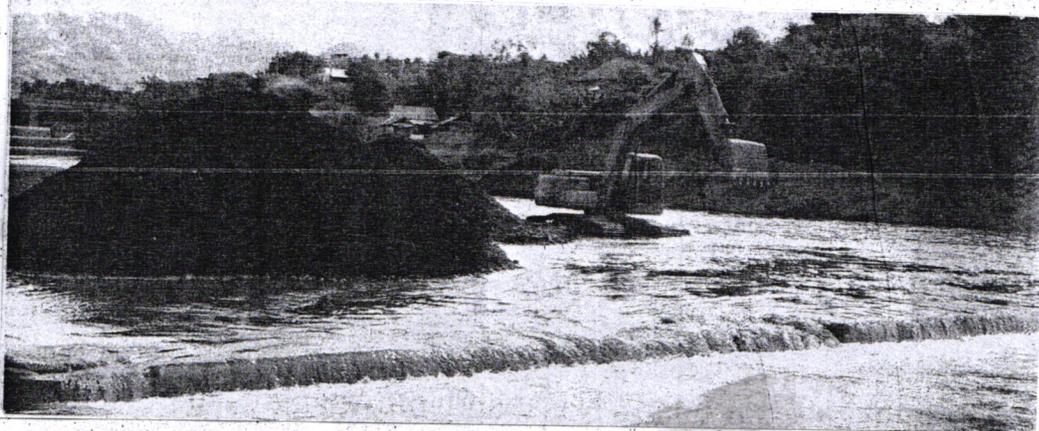
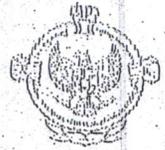
Belanja daerah dan transfer dianggarkan sebesar Rp 2,18 triliun lebih, realisasinya mencapai Rp 1,86 triliun lebih atau 85 persen. Realisasi belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp 1,33 triliun lebih, belanja modal Rp 290 miliar lebih, belanja tak terduga sebesar Rp 92,2 juta dan transfer Rp 240 miliar lebih.

Penerimaan pembiayaan sebesar Rp 148 miliar lebih yang berasal dari Silpa tahun anggaran 2016 sebesar Rp 65,2 miliar lebih dan penerimaan kembali dana bergulir sebesar Rp 637 juta lebih. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 10,4 miliar, untuk penyertaan moda sebesar Rp 10,2 miliar, pembayaran pokok utang sebesar Rp 78 juta lebih dan pembentukan dana bergulir sebesar Rp 150 juta, sehingga besarnya pembiayaan sejumlah Rp 55,4 miliar lebih.

Mencermati hal tersebut, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 65,32 miliar lebih yang terdiri atas saldo pada rekening kas daerah sebesar Rp 41,84 miliar lebih, kas di bendahara penerimaan Rp 100 juta lebih, kas di bendahara JKN Rp 6,61 miliar lebih, kas dana pendidikan Rp 251 juta lebih, kas dana BOS Rp 2,96 miliar lebih dan saldo kas pada rekening kas di BRSU Tabanan selaku BLUD sebesar Rp 13,54 miliar lebih. Bupati Eka berharap agar keempat Ranperda yang diajukan mendapat perhatian dan dilakukan pembahasan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada di DPRD. (kmb28)

Edisi : Selasa, 26 Jun 2018

Hal : _____



Semarapura (Bali Post) -

Pendangkalan Tukad Unda di sekitar eks galian C Kabupaten Klungkung masih terjadi. Kondisi yang berlangsung sejak erupsi Gunung Agung, Karangasem ini belum tersentuh normalisasi. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu alasan. Hal tersebut menyebabkan jalan pelabuhan terancam semakin tergerus karena aliran air beralih haluan.

Berdasarkan pantauan Minggu (24/6) kemarin, pendangkalan terjadi dari cek dam utara jembatan By-pass Ida Bagus Mantra hingga ke selatan. Aliran air masih mengarah ke timur, beralih dari sebelumnya yang langsung ke selatan. "Karena air beralih ke timur akibat Tukad Unda mendangkal, jalan menuju pelabuhan tetap berpotensi tergerus," ungkap Kepala Dinas Per-

hubungan Klungkung I Nyoman Sucitra.

Pejabat asal Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan ini mengatakan sesuai pantauannya, jalan tergerus sudah ada di sejumlah titik. Dikhawatirkan semakin banyak lantaran debit air meningkat seiring hujan lebat yang berlangsung beberapa hari belakangan. "Sudah ada tiga titik yang putus. Kendaraan tidak bisa lewat. Khawatir

juga terus bertambah karena aliran air cukup besar saat hujan," jelasnya. Langkah normalisasi menurutnya sangat perlu dilakukan. Namun itu menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida. "Dishub hanya mengurus pensertifikatan jalan saja," imbuhnya.

PPK Operasi dan Pemeliharaan BWS Bali Penida I Wayan Budiasa mengatakan belum ada rencana penan-

gangan pendangkalan tahun ini. Dinyatakan, anggaran yang dibutuhkan tergolong besar karena cukup panjang. "Tahun ini belum ada. Itu perlu anggaran cukup besar," terangnya.

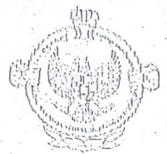
Disebutkan pula, penanganan itu harus diimbangi kajian komprehensif. Kepemilikan lahan harus benar-benar dipastikan supaya nantinya tak memicu polemik. "Di sana masih ada tanah milik warga. Kalau normalisasi, itu harus dikaji secara menyeluruh," tandasnya. Desakan normalisasi sempat datang dari Sekretaris Komisi II DPRD Klungkung I Wayan Buda Parwata. "Jalan menuju

pelabuhan sudah putus karena menjadi aliran sungai. Makanya harus dilakukan normalisasi," tegasnya.

Apalagi, lanjutnya, setelah erupsi Gunung Agung, sejumlah warga sempat melakukan penambangan secara ilegal yang semakin merusak lingkungan. Politikus Partai Hanura ini juga menyarankan pemerintah bekerja sama dengan pemilik alat berat, mengembalikan alur sungai. "Soal hasil galian berupa material pasir, apakah mau dipakai menimbun kubangan yang ada, itu silakan saja dibicarakan dengan pemilik alat berat," pungkas. (kmb45)

Edisi : Senin, 25 Juni 2018

Hal :



Dugaan Korupsi Pengelolaan Objek Wisata

Kejari Amlapura Tunggu Hasil Audit BPKP

Amlapura (Bali Post) -

Kejari Amlapura terus mendalami kasus dugaan korupsi pengelolaan objek wisata. Bahkan, setelah merampungkan serangkaian pemeriksaan pihak terkait, Kejari Amlapura tinggal menunggu kepastian hasil penghitungan kerugian negara oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan). Kajari Amlapura I Nyoman Sucitrawan, Rabu (20/6) kemarin, mengatakan hasil perhitungan BPKP akan segera turun, sehingga penanganan kasusnya bisa segera naik ke tahap II.

Penanganan tahap kedua adalah penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dalam rangka membuat terang dugaan tindak pidana korupsi ini. Termasuk menemukan terangkanya. "Tinggal tunggu hasil penghitungan kerugian negara dari BPKP saja. Nanti, kami lihat dulu hasil penghitungannya seperti apa," kata Sucitrawan yang sudah memerintahkan Kasi Pidsus Kejari Amlapura untuk mempercepat penanganan kasus itu sebelum pindah tugas ke daerah lain.

Dia mengaku belum bisa memastikan, kapan hasil penghitungan kerugian negara oleh BPKP terhadap kasus ini akan turun. Akan tetapi, melihat serangkaian penanganan tahap pertama, dia optimis penanganan berkasnya dapat dituntaskan tahun

” Kalau tidak ada kontrol memadai, jadi, petugas pungutnya mau mengambil tiket berapa pun, otomatis tidak ada masalah. Kami melihat justru dalam kontrol pengawasan itu masalahnya. ”

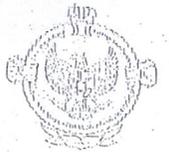
Kajari Amlapura I Nyoman Sucitrawan

ini. Pengungkapan kasus ini, juga bertujuan mendukung pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan pengelolaan objek wisata. Sebab, dari praktik inilah diduga terjadi banyak kebocoran. Sehingga pendapatan yang masuk ke BPKAD tidak maksimal. Padahal, sektor pariwisata di Karangasem, amat menjanjikan dikelola secara profesional, guna mendukung PAD, selain dari sektor galian C.

Kejari Amlapura mencium ada yang tidak beres, setelah dilakukan pengembangan terhadap kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) pelaku pungli di Objek Wisata Tulamben, Kecamatan Kubu. Selama kurun waktu 2011-2017, diduga terjadi tindak pidana korupsi. Ini menjadi salah satu sumber penyebab kebocoran pendapatan di sektor pariwisata. Upaya pengembangan penanganan kasus masih berjalan. Pada

Edisi : Kamis, 21 Juni 2018

Hal :



PULAU INDAH – Candidasa adalah salah satu objek wisata pantai yang relatif banyak dikunjungi wisatawan di Karangasem. Selain dukungan pasir dan laut membentang luas juga sajian pulau kecil nan indah menambah menariknya kawasan itu.

persidangan terungkap kasus OTT di Tulamben, terjadi akibat minimnya pengawasan OPD terkait. Sucitrawan melihat pelakunya, I Nengah Subrata alias Panyong (40). Panyong yang malah sudah divonis satu tahun dua bulan itu bisa leluasa "bermain" pada urusan tiket itu, karena tidak ada kontrol yang memadai.

"Kalau tidak ada kontrol memadai, jadi petugas pungutnya mau mengambil tiket berapa pun, otomatis tidak ada masalah. Kami melihat justru dalam kontrol pengawasan itu masalahnya," kata Sucitrawan.

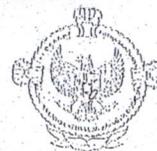
Melihat permasalahan ini, Kejari Amlapura langsung bergerak cepat melaku-

kan pemeriksaan di semua daerah tujuan wisata yang dikelola Dinas Pariwisata. Antara jumlah tiket yang dipegang masing-masing petugas pungut dengan hasil yang disetor kepada pemerintah daerah diselidiki secara keseluruhan. Penyelidikan dilakukan dari rentang waktu 2011 sampai

2017. Setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi terkait, pihaknya saat ini sedang menunggu hasil audit BPKP, untuk menghitung dampak kerugian negaranya. Sebelum turun hasil audit ini, pihaknya belum berani mengungkap total kerugian negara yang ditimbulkan. (kmb31)

Edisi : Kamis, 21 Juni 2018

Hal : _____



Retribusi Parkir Manuver Berpotensi Bocor "Tol Gate" Manual akan Diganti

Negara (Bali Post) -

Kendati telah dipasang *tol gate* di Terminal Manuver untuk memaksimalkan retribusi parkir di pintu keluar Bali, namun nampaknya hal itu masih belum maksimal. Sistem buka tutup palang *tol gate* yang masih manual diduga masih bisa dipermainkan oknum petugas yang nakal. Dengan demikian bisa berpotensi terjadinya kebocoran retribusi. Guna mengantisipasi hal itu, *tol gate* parkir manuver rencananya akan diganti.

Bisa saja pintu *gate* itu tetap dibuka dan kendaraan yang masuk hanya dipungut uangnya tanpa diberikan karcis. Kendaraan yang masuk parkir manuver juga tidak terdata di komputer *gate* dan hal ini berpeluang terjadi kebocoran. Apalagi saat arus kendaraan

ramai, seperti arus mudik. Kondisi seperti ini tak ditampik Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Perhubungan Jembrana I Made Dwi Maharimbawa.

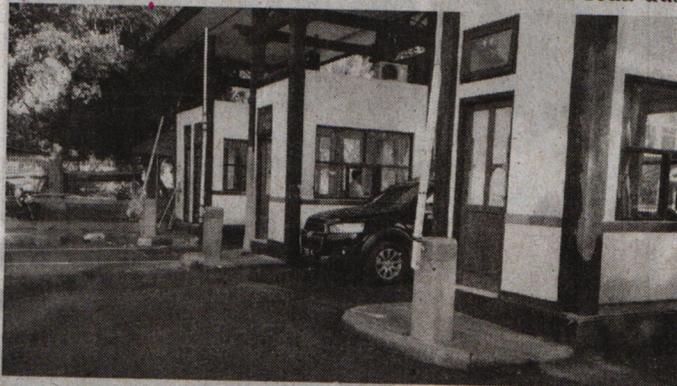
Menurutnya *gate* di parkir manuver masih manual. Hal ini memungkinkan terjadi kebocoran lantaran palang *gate* bisa dibuka terus menerus. Praktis kendaraan yang masuk tak akan terdata di komputer. *Tol gate* ini dipasang sejak awal Maret tahun lalu. Hal ini dilakukan sebagai upaya Dinas Kelautan, Perikanan dan Perhubungan memaksimalkan pungutan retribusi. *Tol gate* pintu masuk ke parkir manuver ini difungsikan untuk tiga peruntukan, yakni roda dua, mobil pribadi serta bus, dan truk.

Retribusi untuk roda dua

senilai Rp 1.000, mobil pribadi Rp 2.000, truk dan bus Rp 3.000. Dalam proses pemungutan, ditugaskan hingga 22 orang petugas. Mereka berjaga secara bergilir atau menerapkan sistem *shift*. Dalam sehari, rata-rata parkir manuver ini bisa mengumpulkan retribusi Rp 8 juta. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya akan mengganti sistem *tol gate* yang saat ini dengan sistem otomatis.

Seperti yang diterapkan di bandara, sehingga setiap kendaraan yang masuk baru akan menerima karcis dan *tol* terbuka setelah bayar. Selain itu juga tercatat nomor polisinya. Palang *tol gate* itu akan buka tutup secara otomatis, tidak manual seperti sekarang ini. Dengan sistem ini, palang tidak bisa dibuka terus menerus. "Sudah dianggarkan dan saat ini masih tender," terang Maharimbawa.

Pihaknya juga sudah berulang kali mengingatkan kepada petugas pungut di parkir manuver supaya bertugas dengan baik sesuai protap. Apalagi mereka sudah meneken pakta integritas. Sanksi tegas pada pegawai kontrak bisa berupa pemecatan bila terbukti melakukan pungli. *Tol gate* itu dipasang juga untuk meminimalisir manipulasi karcis masuk ke parkir manuver. (kmb26)



Bali Post/olo

TOL GATE - *Tol gate di parkir manuver yang rencananya akan diganti untuk menyempurnakan sistem.*

Edisi : Sabtu, 23 Juni 2018

Hal : 9